Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Vol. 13 No. 2 Tahun 2026
ISSN: 2355-6226
E-ISSN: 2477-0299

HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN EFEKTIVITAS GERAKAN SOSIAL

Aisya Zahra Noorrahma[1], Zessy Ardinal Barlan[1,*], Lukman Hakim[1], Rajib Gandi[1], Sampean[1], Andi Muhammad Agriawan Suryaalim[2], Ahmad Aulia Arsyad[3], Ghilandy Ramadhan[1]

[1] Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Indonesia
[2] Fakultas Pertanian Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali Mandar, Indonesia
[3] Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University, Indonesia

[*]Email: zessyardinalbarlan@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat, terutama pada kasus penggusuran. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas gerakan sosial, karena keterlibatan aktif warga dapat memperkuat solidaritas dan memperbesar peluang tercapainya tujuan gerakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, menganalisis efektivitas gerakan sosial yang terjadi, serta mengetahui hubungan antara keduanya. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif didukung dengan data kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 36 unit rumah tangga yang merupakan warga Kampung Susun Bayam, dengan teknik penentuan sampel menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi pada tahap pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi, sementara pada tahap perencanaan sebagian masih berada pada kategori sedang. Efektivitas gerakan sosial berada pada kategori tinggi. Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan efektivitas gerakan sosial.

Kata kunci: efektivitas, gerakan sosial, partisipasi masyarakat, penggusuran

THE CORRELATION BETWEEN COMMUNITY PARTICIPATION LEVELS AND THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MOVEMENTS

ABSTRACT

Social movements emerge as a response to injustices experienced by communities, particularly in cases of eviction. Community participation is an important factor in determining the effectiveness of social movements, as active involvement can strengthen solidarity and increase the likelihood of achieving the movement's goals. This study aims to analyze the level of community participation, examine the effectiveness of the social movement, and identify the relationship between the two. The study employs a quantitative approach supported by qualitative data. The respondents consist of 36 households from Kampung Susun Bayam, selected using a census sampling method. The results show that the level of community participation is high in the stages of implementation, benefit utilization, and evaluation, while participation in the planning stage is partly at a moderate level. The effectiveness of the social movement is categorized as high. Correlation analysis indicates that there is a relationship between the level of community participation and the effectiveness of the social movement.

Keywords: *community participation, effectiveness, eviction, social movement*

PERNYATAAN KUNCI

- Penggusuran Kampung Bayam memunculkan gerakan sosial warga untuk memperjuangkan hak atas hunian, ruang hidup, dan keberlanjutan penghidupan pasca pembangunan Jakarta Internasional Stadium.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial tergolong tinggi pada seluruh tahapan, dengan proporsi kategori sedang terbesar terdapat pada tahap perencanaan, yaitu 19,44% (7 dari 36 responden).
- Efektivitas gerakan sosial berada pada kategori tinggi, ditandai dengan kuatnya solidaritas, komitmen warga yang berkelanjutan, serta dukungan masyarakat yang luas dalam berbagai aksi dan kegiatan kolektif.
- Meskipun sebagian tuntutan belum terpenuhi, gerakan sosial tetap bertahan dan masyarakat tetap menjaga daya juangnya.
- Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas gerakan sosial (rho= 0,828). Temuan ini menunjukkan keterkaitan antara kedua variabel, bukan hubungan sebab-akibat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait perlu memperkuat mekanisme pelibatan masyarakat dalam setiap proses penataan kawasan dan penyelesaian konflik permukiman. Keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengurangi potensi konflik di masa depan.

Pemerintah juga perlu mendukung pengembangan sumber penghidupan warga melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kawasan, termasuk pengembangan pertanian perkotaan berbasis komunitas. Langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

Penguatan forum komunikasi antara warga, pemerintah, dan pengelola kawasan untuk menjaga solidaritas, keberlanjutan aktivitas pertanian perkotaan, serta pengelolaan lingkungan yang partisipatif juga diperlukan. Upaya tersebut dapat mendukung terciptanya pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan perkotaan yang pesat sering kali menimbulkan konflik antara kebutuhan pembangunan dan pemenuhan hak masyarakat atas ruang hidup. Penggusuran yang terjadi di berbagai wilayah perkotaan tidak hanya berdampak pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, hubungan sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak (Zaera 2024). Dalam kondisi tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan aspirasi warga dapat terakomodasi dalam proses pembangunan dan penyelesaian konflik.

Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi (Ulum dan Dewi 2021). Keterlibatan aktif masyarakat dalam aksi kolektif juga terbukti mendorong keberlanjutan gerakan sosial serta memperkuat kapasitas warga dalam memperjuangkan hak-haknya (Carvacho *et al.* 2023; Barlan *et al.* 2025). Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas gerakan sosial dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kasus Kampung Bayam di Jakarta Utara menunjukkan bagaimana masyarakat terdampak penggusuran membangun gerakan sosial untuk memperjuangkan kepastian hunian dan keberlanjutan penghidupan. Kasus Kampung Bayam di Jakarta Utara menunjukkan bagaimana masyarakat terdampak penggusuran membangun gerakan sosial untuk memperjuangkan kepastian hunian dan keberlanjutan penghidupan. Berbagai bentuk partisipasi warga dilakukan melalui musyawarah, aksi kolektif, advokasi, serta penguatan solidaritas komunitas. Penelitian Hooper dan Ortolano (2012) menunjukkan hubungan antara partisipasi gerakan sosial dan keberhasilan relokasi pascapenggusuran Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan konteks komunitas petani perkotaan di Indonesia serta mengoperasionalkan WUNC secara kuantitatif untuk melihat efektivitas yang dipersepsikan dari gerakan sosial dan hubungannya dengan tahapan partisipasi Cohen dan Uphoff (1977). Sejauh pengetahuan penulis, pendekatan tersebut belum banyak digunakan pada kasus penggusuran permukiman di Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam

gerakan sosial Kampung Bayam; (2) menganalisis efektivitas yang dipersepsikan dari gerakan sosial Kampung Bayam; dan (3) menganalisis hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas gerakan sosial.

SITUASI TERKINI

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, rata-rata tahunan laju pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun terakhir sebesar 0,32 % (BPS Provinsi DKI Jakarta 2026). Pertumbuhan dan mobilitas penduduk perkotaan meningkatkan kebutuhan ruang dan lahan, yang dapat beriringan dengan konflik penataan permukiman. Fenomena tersebut terlihat pada kasus Kampung Bayam di Jakarta Utara, dengan 642 rumah tangga atau sekitar 1.612 jiwa yang sebagian besar merupakan petani *urban* yang menggantungkan hidup pada pertanian bayam dan kangkung terpaksa meninggalkan permukiman mereka sejak 14 Maret 2019 akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Penggusuran ini tidak semata berdampak pada hilangnya tempat tinggal fisik, tetapi juga menghapus sistem pertanian kota (*urban farming*) berbasis komunitas yang telah menjadi penopang ekonomi warga. Setelah direlokasi sementara ke Rusun Nagrak, Cilincing, masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat meningkatnya biaya transportasi yang mencapai sekitar Rp50.000/hari untuk menjangkau lokasi kerja semula. Kondisi ini sejalan dengan temuan Asian Development Bank (1995) dalam Hadwi *et al.* (2025) yang menegaskan bahwa penggusuran tanpa kompensasi layak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika mengabaikan dampak sosial-ekonomi masyarakat terdampak.

Ketimpangan struktural yang dialami warga memicu lahirnya gerakan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan sejak 2019 hingga 2025. Gerakan ini diwujudkan melalui beragam bentuk tindakan kolektif seperti aksi demonstrasi, audiensi dengan pemerintah dan PT Jakpro, pendampingan hukum oleh LBH, pendirian hunian sementara secara swadaya, hingga mediasi oleh Komnas HAM yang menghasilkan Akta Perdamaian melalui mekanisme *restorative justice* pada 30 Mei 2024. Pada 6 Maret 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan kunci hunian secara simbolik setelah audiensi dengan warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan jaminan hak tinggal selama 30 tahun yang dapat diwariskan serta pelibatan warga dalam pengelolaan agrowisata dan stadium tour.

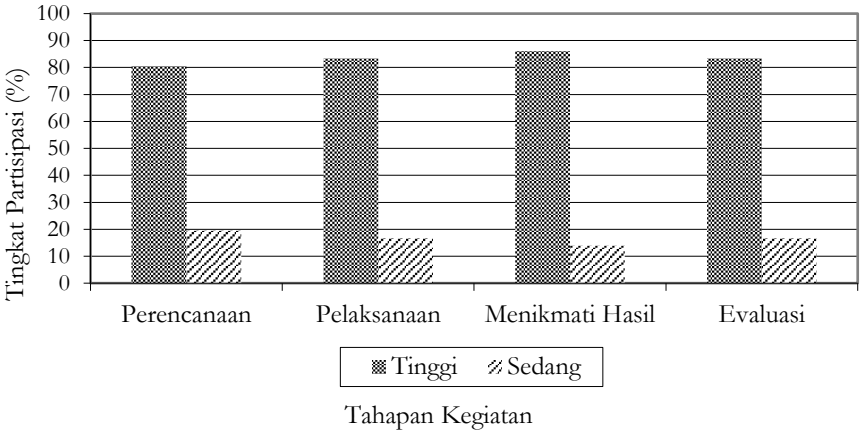
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Bayam, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Februari hingga Maret 2026. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* karena merupakan kawasan yang terdampak penggusuran akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan menjadi lokasi berlangsungnya gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak atas hunian dan keberlanjutan penghidupan. Populasi penelitian adalah 36 kepala keluarga (KK) warga Kampung Susun Bayam yang terlibat dalam gerakan sosial. Jumlah tersebut digunakan sebagai populasi penelitian karena penelitian berfokus pada warga yang terlibat langsung dalam gerakan sosial, bukan seluruh KK yang pernah terdampak penggusuran. Seluruh 36 KK dijadikan responden melalui metode sensus.

Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan bentuk keterlibatan warga dan pengalaman kolektif yang mendasari temuan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bertahap.

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN SOSIAL

Dominasi kategori tinggi pada seluruh tahapan partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Bayam terlibat secara aktif dalam setiap proses gerakan sosial, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Cohen dan Uphoff 1977). Tingginya keterlibatan ini berkaitan erat dengan posisi masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh penggusuran dan ketidakpastian pemenuhan hak hunian. Situasi tersebut mendorong warga untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan gerakan sosial sebagai upaya memperjuangkan kepentingan bersama. Temuan ini sejalan dengan pendapat Czapanskiy dan Manjoo (2008) dalam Riyanto dan Kovalenko



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Gerakan Sosial

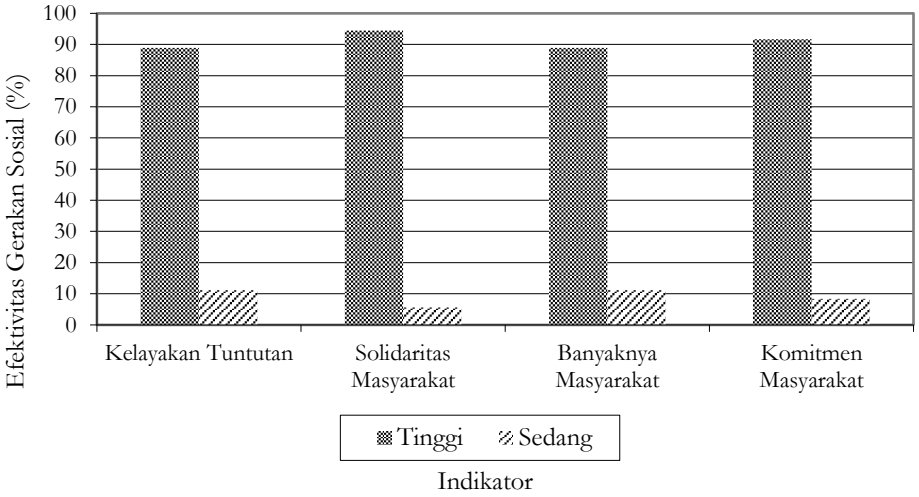
(2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat cenderung muncul ketika suatu persoalan memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan individu maupun kelompok yang mengalaminya.

Tahap perencanaan memiliki proporsi kategori sedang paling besar, yaitu 19,44% atau 7 dari 36 responden. Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden dalam kategori sedang tetap mengikuti perkembangan gerakan sosial, tetapi tidak selalu terlibat langsung dalam forum perencanaan. Informasi mengenai hasil rapat atau perkembangan perjuangan umumnya diperoleh melalui tetangga maupun percakapan antarwarga. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi tidak langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ihsan dan Rini (2025) yang menjelaskan bahwa partisipasi dapat berlangsung melalui pertukaran informasi di tingkat komunitas tanpa keterlibatan langsung dalam forum formal. Selain itu, Alfiandi *et al.* (2019) menemukan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam suatu kegiatan tanpa berpartisipasi secara langsung dalam proses perumusan maupun pengambilan keputusan, tetapi tetap menjadi bagian dari proses partisipatif yang berlangsung. Namun demikian, keterlibatan yang terbatas dalam tahap perencanaan dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam penentuan arah perjuangan bersama. Padahal, tahap perencanaan merupakan ruang penting untuk bertukar gagasan, menyusun strategi, dan menetapkan prioritas yang akan diperjuangkan secara kolektif (Jamal *et al.* 2018).

Tahap menikmati hasil merupakan tahapan dengan persentase kategori tinggi terbesar, yaitu 86,11%. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses perjuangan, tetapi juga merasakan dan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari gerakan sosial tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan ruang yang tersedia untuk melanjutkan kegiatan pertanian, budidaya ikan, mengolah hasil panen menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi, serta mengembangkan gagasan kampung agrowisata berbasis edukasi pertanian perkotaan. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Bayam tidak hanya berupaya mempertahankan tempat tinggal, tetapi juga berusaha menjaga keberlanjutan sumber penghidupan mereka. Kondisi ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus mempertahankan fungsi lingkungan di kawasan perkotaan. Meskipun demikian, tingginya partisipasi pada tahap menikmati hasil tidak berarti seluruh tuntutan masyarakat telah terpenuhi. Beberapa responden menyatakan bahwa masih terdapat hak yang belum sepenuhnya diperoleh, seperti kepastian legalitas hunian dan administrasi kependudukan. Temuan ini sejalan dengan Riyadi *et al.* (2022) dan Permatasari *et al.* (2025) serta Hapsari *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa tahap menikmati hasil bukan merupakan akhir dari proses partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi tetap diperlukan untuk mengawal pemenuhan tuntutan yang masih diperjuangkan .

EFEKTIVITAS GERAKAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI PENGGUSURAN

Efektivitas gerakan sosial dianalisis melalui empat indikator, yaitu kelayakan tuntutan (*worthiness*), solidaritas anggota (*unity*), jumlah



Gambar 2. Efektivitas Gerakan Sosial dalam Menghadapi Penggusuran

pihak yang terlibat (*numbers*), dan komitmen anggota (*commitment*) (Tilly dalam Syawaludin (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut didominasi oleh kategori tinggi. Namun, terdapat variasi pada masing-masing indikator yang menunjukkan dinamika efektivitas gerakan sosial di Kampung Bayam. Solidaritas anggota (*unity*) menjadi indikator dengan persentase kategori tinggi terbesar, yaitu 94,44%. Tingginya solidaritas ini menunjukkan kuatnya hubungan sosial antarwarga yang terbangun selama proses perjuangan, baik melalui kegiatan bersama, dukungan moral, maupun kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi keberlangsungan gerakan sosial karena mampu menjaga keterlibatan masyarakat dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Sementara itu, indikator kelayakan tuntutan (*worthiness*) dan jumlah pihak yang terlibat (*numbers*) memiliki proporsi kategori sedang terbesar dibandingkan indikator lainnya, masing-masing sebesar 11,11%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat menilai tuntutan yang diperjuangkan sudah layak dan mendapatkan dukungan yang luas, masih terdapat sebagian responden yang memiliki penilaian berbeda. Pada indicator *worthiness*, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan belum terpenuhinya seluruh tuntutan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepastian hunian dan hak administratif. Adapun pada indikator *numbers*, variasi penilaian dapat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan gerakan sosial. Tilly dalam Syawaludin (2016) menjelaskan bahwa solidaritas dan keyakinan bersama merupakan sumber daya penting yang menentukan kekuatan suatu gerakan sosial. Oleh karena itu, tingginya solidaritas masyarakat Kampung Bayam menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan gerakan, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan terkait pencapaian tuntutan dan luasnya keterlibatan masyarakat dalam perjuangan tersebut.

Tingginya solidaritas masyarakat Kampung Bayam tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui berbagai pengalaman yang dijalani bersama selama proses perjuangan. Masyarakat secara rutin mengikuti pertemuan warga, tinggal bersama di hunian sementara dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, terlibat dalam aksi demonstrasi, memberikan dukungan ketika Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam, Muhammad Furqon, ditahan pada April 2024, hingga bersama-sama menyepakati proses mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM. Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat hubungan antarwarga dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memperjuangkan tujuan yang sama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa kohesivitas kelompok berhubungan dengan tingkat partisipasi anggotanya. Dalam konteks Kampung Bayam, ikatan sosial tersebut tidak hanya terbentuk karena kesamaan nasib sebagai warga terdampak penggusuran, tetapi juga karena adanya identitas bersama sebagai komunitas petani perkotaan yang telah lama hidup dan beraktivitas di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, indikator kelayakan tuntutan (*worthiness*) belum seluruhnya berada pada kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan

bahwa masih terdapat sebagian warga yang belum sepenuhnya yakin bahwa tuntutan yang mereka perjuangkan akan memperoleh respons dan penyelesaian yang sesuai dari pihak berwenang. Bailey *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kelayakan tuntutan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjukkan bahwa suatu gerakan memiliki tujuan yang sah dan layak memperoleh perhatian dari pemerintah maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, meskipun solidaritas masyarakat Kampung Bayam tergolong sangat kuat, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan keyakinan warga bahwa tuntutan yang diperjuangkan dapat memperoleh pengakuan dan penyelesaian yang adil.

Berbeda dengan indikator solidaritas, indikator jumlah pihak yang terlibat (*numbers*) menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keterlibatan masyarakat secara merata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa responden menilai partisipasi dalam berbagai kegiatan gerakan sosial masih didominasi oleh orang-orang yang sama, sementara sebagian warga lainnya tidak selalu dapat terlibat karena kesibukan pekerjaan maupun tanggung jawab rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan untuk berpartisipasi, tetapi juga oleh ketersediaan waktu dan kemampuan masing-masing individu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hardianti (2019) dan Fatin *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi serta alokasi waktu yang dimiliki oleh anggota komunitas.

Dalam konteks Kampung Bayam, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena keberhasilan gerakan sosial memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing anggota. Keterlibatan masyarakat tidak harus selalu diwujudkan melalui kehadiran dalam setiap kegiatan, tetapi juga dapat dilakukan melalui penyebaran informasi, dukungan terhadap keputusan bersama, maupun kontribusi lain yang mendukung keberlangsungan gerakan sosial. Hal ini menjadi penting terutama pada situasi saat ini, ketika sebagian tuntutan masyarakat mulai memperoleh respons dari berbagai pihak.

Hendri dan Wirman (2017) menjelaskan bahwa keberlanjutan gerakan sosial sering kali menghadapi tantangan setelah tekanan atau konflik utama mulai mereda. Oleh karena itu, upaya menjaga partisipasi dan komitmen masyarakat tetap diperlukan agar tujuan yang belum tercapai dapat terus diperjuangkan secara kolektif.

HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DENGAN EFEKTIVITAS GERAKAN SOSIAL

Hasil uji korelasi peringkat *Spearman* menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas gerakan sosial, dengan koefisien korelasi sebesar 0,828 (N= 36). Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian, nilai tersebut termasuk kategori sangat kuat. Karena seluruh populasi penelitian yang ditetapkan berjumlah 36 KK telah disensus, koefisien tersebut dibaca sebagai gambaran hubungan pada populasi kasus yang diteliti.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial, maka semakin tinggi pula efektivitas gerakan sosial yang dicapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sukmana (2013) yang menyatakan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat

Tabel 1. Hasil Uji Korelasi Peringkat *Spearman*

			Partisipasi	**Gerakan Sosial**
Spearman's rho	Partisipasi	*Correlation* Coefficient	1.000	0,828**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	36	36
	Gerakan Sosial	*Correlation* Coefficient	0.828**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	36	36

dipengaruhi oleh keterlibatan anggota dalam berbagai proses perjuangan kolektif. Dalam konteks Kampung Bayam, partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat dalam kehadiran pada berbagai kegiatan, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas antarwarga, meningkatkan dukungan terhadap tuntutan yang diperjuangkan, serta menjaga komitmen masyarakat untuk tetap terlibat dalam perjuangan yang berlangsung.

Tingginya partisipasi pada tahap perencanaan memungkinkan masyarakat terlibat dalam penyusunan tuntutan bersama, sedangkan partisipasi pada tahap pelaksanaan dan menikmati hasil berkontribusi terhadap terbentuknya rasa kebersamaan dan keyakinan bahwa perjuangan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, keterlibatan dalam tahap evaluasi berperan dalam menjaga keberlanjutan gerakan melalui pengawasan terhadap perkembangan hasil yang telah dicapai. Temuan ini juga didukung oleh Kristianto (2015), Indriana dan Akbar (2024) dan Kamalia *et al.* (2025) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap penguatan solidaritas, perluasan dampak sosial, serta keberlanjutan gerakan dalam jangka panjang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelesaian konflik akibat penggusuran. Dalam kasus Kampung Bayam, keberhasilan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh adanya tuntutan yang diperjuangkan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perjuangan. Oleh karena itu, upaya penanganan konflik permukiman tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan kompensasi atau penyelesaian administratif, tetapi juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Muhartono dan Nurlaili 2022). Temuan ini sejalan pula dengan penelitian Hooper dan Ortolano (2012) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses relokasi dan pemulihan kehidupan pasca penggusuran.

Hasil penelitian Hartanto *et al.* (2023) dan Thohir (2024) juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat mampu memperkuat posisi tawar warga dalam memperjuangkan hak-haknya serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, penguatan partisipasi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan penanganan konflik permukiman dan pembangunan perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfandi D, Qurniati R, Febryano IG. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove. *Jurnal Sylva Lestari* 7(1): 30–41. https://doi.org/10.23960/jsl1730-41

Bailey ER, Wang D, Soule SA, Rao H. 2023. How Tilly's WUNC Works: Bystander Evaluations of Social Movement Signals Lead to Mobilization. *American Journal of Sociology* 128(4): 1206–1262. https://doi.org/10.1086/723489

Barlan ZA, Hamida S, Suryaalim AMA, Hakim L, Gandi R, Arsyad AA. 2025. Analisis Kesiapan Jogja Smart Service (JSS) dalam Mendukung Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Jurnal *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan 12*(3): 232-239. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i3.69442

Carvacho H, González R, Cheyre M, Rocha C, Cornejo M, Jiménez-Moya G, Livingstone A. 2023. When Social Movements Fail or Succeed: Social Psychological Consequences of a Collective Action's Outcome. *Frontiers in Psychology* 14: 1155950. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1155950

Fatin AN, Kaswanto RL, Nurhayati HSA. 2025. Contribution of KWT Gardens to Plant Biodiversity and Carbon Stock in Bogor City. SOCA: *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 19 (2): 137-151. https://doi.org/10.24843/SOCA.2025.v19.i02.p06

Hapsari P, Nurhayati, Kaswanto RL. 2025. Analisis Potensi Daya Tarik Wisata Lanskap Budaya Jayengan Kampung Permata Surakarta. *Jurnal Lanskap Indonesia* 17(1): 34-42. https://doi.org/10.29244/jli.v17i1.55465

Hardianti S. 2019 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota).

Hartanto MFB, Aziz DAN, Suntoro A. 2023. Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM sebelum, sewaktu, dan setelah Penggusuran. *Jurnal*

HAM 14(2): 169–184. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.169-184

Hendri N, Wirman HP. 2017. Gerakan Radikalisme Islam (Ancaman Ideologi Radikalisme Islam terhadap Kebhinekaan di Sumatera Barat). IAIN Bukittinggi Press

Hooper M, Ortolano L. 2012. Confronting Urban Displacement: Social Movement Participation and Post-Eviction Resettlement Success in Dar es Salaam, Tanzania. *Journal of Planning Education and Research* 32(3): 278–288. https://doi.org/10.1177/0739456X12440775

Ihsan H, Rini WDE. 2025. Tipe Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Wisata di Taman Wisata Tebing Breksi Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. *Agrisocio Business* 4(2): 125–132. https://doi.org/10.31315/agrisociabus.v4i2.15650

Indriana H, Akbar H. 2024. Tipologi Konformitas Sosial Kelompok Petani Kecil dalam Merespon Kebijakan Pertanian Organik di Tasikmalaya Jawa Barat. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 11(2): 92-101. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v11i2.56645

Jamal Z, Alaydrus A, Dyastari EL. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara* 6(3): 7988–8001.

Khaliq KH, Wulandari I, Dwi Bachtiar El-Rizaq A. 2025. Gerakan Sosial Pemuda dalam Melestarikan Program Word Clean-up Day Indonesia (WCDI) di KPMM. *SOC EDUC.* 12(2):188–207. https://doi.org/10.31571/sosial.v12i2.9210

Kristianto FAN. 2015. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan "Bela-Beli Kulon Progo". *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 12(1): 50–61.

Muhartono R, Nurlaili. 2022. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai dengan Kegiatan Budidaya Keramba Ikan Arus Deras (Kasus Sungai Pesanggrahan di DKI Jakarta). *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 9(1): 52-60. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i1.28065

Permatasari PA, Arifin HS, Kaswanto RL, Mulyana E. 2025. Residential Landscape Management Practices and Environmental Contributions to ESG. *Highlights of Sustainability* 5(1): 165–178. https://doi.org/10.54175/hsustain5010012

Prasetyo AS, Musabbikhin A, Satmoko S. 2020. Hubungan Kohesivitas dengan Partisipasi Anggota pada Kelompok Tani Ternak Rejeki Lumintu di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 13(3): 232–241. https://doi.org/10.19184/jsep.v13i3.18537

Riyadi A, Rahmasari A, Sugiarso S. 2022. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi di Kelurahan Mijen, Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 8(1): 193–218. https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i1.5873

Riyanto M, Kovalenko V. 2023. Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(2): 374–388. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388

Sukmana O. 2013. Konvergensi antara Resource Mobilization Theory dan Identity-Oriented Theory dalam Studi Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8(1): 39–62.

Thohir MA. 2024. Pembangunan, Kaum Miskin Kota, dan Aktivisme: Studi Kasus Penggusuran Kampung Kentingan Baru, Kota Solo. *Jurnal Analisa Sosiologi* 13(2): 249–270. https://doi.org/10.20961/jas.v13i2.78683

Ulum S, Dewi SA. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik* 3(1): 14–24. https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408

Zaera MRP. 2024. Faktor dan Dampak dari Peningkatan Urbanisasi di DKI Jakarta pada Tahun 2023. *Jurnal Wahana Bina Pemerintah* 6(1): 38–42. https://doi.org/10.55745/jwbp.v6i1.167